

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Salah satu pilar dalam berdirinya suatu negara yang memiliki fungsi vital dan penentu kehidupan bernegara adalah pertahanan. Pertahanan adalah suatu hal yang mencakup berbagai kegiatan yang bersifat melindungi (protektif), yang diselenggarakan oleh negara dan pemerintah juga rakyat (semesta) demi mendefenisikan, memajukan dan menjaga kepentingan negara di kancah dunia (Setiadji, 2020). Negara adalah salah satu aktor sentral atau unit politik yang paling penting di dalam sistem internasional yang anarki dan secara normatif akan selalu berupaya untuk waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang terjadi akibat dari interaksi antar negara ataupun bentuk ancaman lainnya.

Negara menganut prinsip '*selfhelp*', dimana negara harus mengukur sendiri tingkat keamanannya sesuai dengan persepsinya masing-masing karena adanya ketidak-pastian tentang maksud dari perilaku negara lain ataupun lingkungan eksternal lainnya. Semua dilakukan oleh setiap negara agar tetap *survive* dari berbagai bentuk ancaman. Adapun upaya pertahanan negara mempertimbangkan dinamika perkembangan lingkungan strategis yang mengakibatkan timbulnya ancaman dan berdampak pada pertahanan negara (Supandi, 2019). Perkembangan lingkungan strategis yang terus berubah secara dinamis, berdampak pada dan keamanan negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Pertahanan juga bagian dari barang publik yang bersifat *intangible* (tidak kasat mata). Hal tersebut disebabkan karena barang dan jasa yang diproduksi oleh kegiatan pertahanan adalah rasa aman dari segala ancaman. Pertahanan juga merupakan barang publik yang bersifat noneksklusif dan nonrivalitas. Noneksklusif adalah sesuatu yang dapat memberikan manfaat bagi semua warga tanpa terkecuali dan nonrivalitas yaitu konsumsi tambahan dapat dimungkinkan tanpa adanya biaya

marginal. Oleh karena produk kegiatan pertahanan adalah barang publik, maka untuk penyediaannya hanya dilakukan oleh negara saja.

Sebagai hukum dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara resmi dalam Pembukaan UUD 1945, memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara. Pada pembukaan UUD 1945, tertuang prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pertahanan negara yang dijiwai oleh Pancasila, yaitu "*Bangsa Indonesia pada hakikatnya cinta damai tetapi lebih mencintai kemerdekaan serta kedaulatannya*". Selanjutnya Pada alinea II juga diamanatkan Cita-cita Nasional Bangsa Indonesia yaitu "*Terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur*".

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah yang sangat subur dan makmur, serta memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah. Bentuk muka bumi yang beragaman dengan diperkaya letak geografisnya maupun letak astronomisnya, menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Luas wilayah Indonesia juga menempati posisi kelima di dunia terbesar setelah negara Rusia. Oleh karena letak Indonesia yang strategis dan luas maka diperlukan pertahanan negara yang kuat. Upaya penyelenggaraan pertahanan negara adalah untuk mencegah dan mengatasi berbagai ancaman baik ancaman nyata maupun belum nyata, ancaman dari dalam maupun dari luar. Setiap bentuk ancaman tersebut memiliki karakteristik serta tingkat resiko berbeda yang mempengaruhi pola penanganannya, sehingga perlu dicermati hal-hal yang berhubungan dengan analisa, penggolongan, sasaran, dan eskalasi ancaman.

Eksistensi bangsa dan negara dipertaruhkan untuk menghadapi berbagai ancaman. Ancaman terdiri atas ancaman aktual dan faktual. Berbagai bentuk *ancaman aktual* yang timbul terhadap keamanan nasional yang kerap sekali terjadi seperti wabah penyakit, serangan senjata biologis, bencana alam dan lingkungan pemerosotan pertumbuhan ekonomi, konflik komunal, gerakan kelompok radikal dan

separatisme bersenjata, kerusuhan sosial dan gangguan keamanan laut dan udara sebagai contoh konflik Laut Cina Selatan, pelanggaran wilayah perbatasan (inetrvensi asing) narkoba, imigran asing dan dampak revolusi industri 4.0. Adapun ancaman potensial adalah ancaman yang belum terjadi namun sewaktu-waktu dapat terjadi dalam situasi tertentu, seperti perang konvensional atau konflik terbuka (invasi asing), kelangkaan pangan;energi;sumber daya air, kesehatan, dan ancaman senjata nuklir.

Dalam isu keamanan, ancaman yang berasal dari luar dan ancaman yang timbul di dalam negeri selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi, sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Perbedaannya hanya mungkin dilakukan dalam konteks bentuk dan organisasi ancaman, sementara perbedaan berdasarkan sumber timbulnya ancaman sangat sulit untuk ditentukan. Ancaman dalam bentuk kejahatan lintas negara terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari waktu ke waktu yang diantaranya adalah maraknya berbagai aksi perompakan/pembajakan, penyelundupan manusia, senjata amunisi, perdagangan obat-obatan terlarang, dan imigrasi gelap dan bentuk kejahatan lintas negara lainnya. Selain itu, kecenderungan ancaman yang muncul dalam keamanan regional adalah konflik yang menyangkut klaim teritorial, jalur komunikasi laut dan jalur perdagangan melalui laut. Berbagai ancaman tersebut tentu saja memberikan dampak buruk terhadap stabilitas kawasan serta negara yang bersangkutan.

Perkembangan lingkungan strategis pada tataran regional, di kawasan Asia juga dapat memicu ketidakstabilitas kawasan diantaranya konflik di Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan konflik Tiongkok-Taiwan. Pada tataran global, geo-politik global masih harus dihadapkan pada persaingan negara-negara besar. Ancaman-ancaman yang kerap terjadi juga didukung oleh jaringan yang rapih berskala internasional, digerakan oleh aktor yang didukung dengan kemampuan teknologi dan finansial. Berbagai dinamika ancaman yang berasal dari luar dan dalam negeri

tersebut menjadi persoalan terberat bagi suatu bangsa dalam mempertahankan kedaulatannya.

Sebagai negara terbuka, Indonesia tidak akan lepas dari pengaruh perkembangan global dan regional. Stabilitas keamanan lingkungan strategis menjadi bagian kepentingan nasional Indonesia sehingga Indonesia berkepentingan untuk mencermati perkembangan situasi yang mengancam perdamaian dunia dan stabilitas regional agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat. Indonesia menyadari bahwa keamanan dalam tatanan nasional dan internasional (global dan regional) menjadi bagian dari kepentingan strategis negara-negara lain.

Berangkat dari kenyataan tersebut, upaya pertahanan tidak hanya mengacu pada isu keamanan tradisional, yakni invasi atau agresi dari negara lain, tetapi juga pada isu keamanan non-tradisional, yaitu setiap aksi yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Identifikasi ancaman dari luar dan dalam negeri yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara. Demikian juga penyelenggaraan pertahanan negara yang berpedoman pada sistem pertahanan rakyat semesta (SISHANKAMRATA), melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya. SISHANKAMRATA dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman dengan memperhatikan aspek perkembangan lingkungan strategis. Namun, kebijakan pertahanan negara juga seyogianya mampu menghadapi ancaman yang ditimbulkan dari dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik nasional, regional dan global.

Pembangunan pertahanan menjadi semakin kompleks dan penuh dengan ketidak-pastian dewasa ini, disamping suatu bangsa memiliki cita-

cita untuk membangun kekuatan pertahanan harus dapat mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi yang optimal. Oleh sebab itu, pembangunan pertahanan tidak lepas dari dukungan anggaran pertahanan. Dalam rangka upaya suatu negara menyelenggarakan pertahanan negara, maka hal yang menjadi tolak ukur adalah daya dukung atau besaran anggaran pertahanan suatu negara yang merupakan bagian dari anggaran belanja negara.

Secara hakekatnya, Brzoska dalam Hartley dan Sandler (1995) berpendapat bahwa anggaran pertahanan adalah biaya untuk membangun kekuatan pertahanan dalam masa perang maupun masa damai. Anggaran pertahanan seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk berbagai macam keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara. Anggaran pertahanan menjadi tolak ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan dan kebijakan negara dalam menyikapi sistem pertahanan yang digunakan serta untuk melihat sumber daya yang diberikan oleh negara kepada angkatan bersenjata, dan komitmen negara dalam pengelolaan dan peningkatan kapabilitas pertahanan.

Kebijakan anggaran pertahanan sangat bergantung pada berbagai faktor antara lain diantaranya perkembangan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi nasional, kemampuan keuangan negara, skala prioritas pembangunan, dan pandangan terhadap hakikat ancaman yang dihadapi negara. Indikator-indikator ancaman yang dipertimbangkan oleh sebuah negara untuk menganalisa atau mengevaluasi lingkungan strategis mereka. Indikator-indikator tersebut adalah *aggregate capabilities of other states*, *geography*, *offense-defense balance* dan *perception of intentions*. Dengan menggunakan keempat indikator tersebut, sebuah negara dapat menentukan apakah ada ancaman yang mengancam keutuhan negara tersebut.

Setiap analisis dan survei masalah di bidang anggaran pertahanan harus mempertimbangkan aspek pembangunan dan keamanan pada saat yang bersamaan. Alternatif yang dapat digunakan untuk melihat masalah mengenai anggaran pertahanan adalah dengan menganalisis sebab dan akibat dari pengeluaran belanja pertahanan. Belanja pertahanan merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah negara dan merupakan suatu yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat (Kunio, 1999).

Suatu negara dapat dikategorikan memiliki kualitas sistem pertahanan yang baik adalah memiliki kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki. Perkembangan teknologi yang semakin canggih juga turut diiringi oleh inovasi persenjataan jenis baru yang tentu saja lebih canggih, menuntut masing-masing negara bersaing dalam menciptakan alutsista terbaik milik negara. Hedley Bull menyatakan bahwa *arms race* merupakan kompetisi yang intensif antara negara ataupun kelompok negara yang saling bertentangan, masing-masing pihak berusaha untuk mencapai keunggulan militer dengan cara meningkatkan kualitas sistem persenjataan (Setiadji, 2020). Namun di lain pihak, *arms race* bisa saja dianggap sebagai alasan timbulnya ancaman bagi negara lain sehingga terjadi persaingan militer antar negara tersebut dimana jika suatu negara berupaya untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya maka negara lain menganggap hal tersebut adalah ancaman baginya (Buzan, 1989).

Selain *arms race*, masing-masing negara berupaya meningkatkan kualitas daya tempur dan daya gempur persenjataan dengan kemampuan senjata (*arms built up*) dimana *arms built up* adalah peningkatan secara spiral kemampuan militer suatu negara secara nyata dengan metode peningkatan anggaran pertahanan, peningkatan personal militer dan modernisasi persenjataan. Tetapi pada dasarnya, anggaran pertahanan dialokasikan untuk biaya pemeliharaan dan perawatan, serta biaya sarana pertahanan dalam kurun waktu tertentu. Terkhusus Indonesia dan bahkan di beberapa negara lainnya, anggaran belanja pertahanan merupakan

biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bidang pertahanan seperti gaji prajurit/ASN pada kementerian/lembaga terkait, biaya pengadaan sistem persenjataan/alutsista, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kekuatan pertahanan dan serta pelayanan yang dibutuhkan dalam rangka mempertahankan kesiapan SDM dalam kurun waktu tertentu/periode satu tahun (Setiadji, 2020).

Salah satu alasan meningkatnya anggaran pertahanan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah adanya kemajuan dari sisi ekonomi. Kenaikan anggaran tersebut akan digunakan untuk merealisasikan program yang berkaitan dengan militer termasuk diantaranya adalah pembelian dan modernisasi alutsista. Anggaran pertahanan yang riil untuk membiayai kegiatan operasi, pemeliharaan Alutsista dan pembangunan kekuatan pertahanan berada di bawah kebutuhan minimal.

**Tabel 1.1 Besar Alokasi Anggaran Pertahanan di Indonesia**

<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN PERTAHANAN</b>
2010	42.391.600.000.000
2011	50.033.900.000.000
2012	61.226.856.461.000
2013	87.706.685.334.000
2014	86.185.628.390.000
2015	105.907.340.480.000
2016	109.003.928.025.000
2017	117.506.617.827.295
2018	106.832.343.039.117
2019	115.424.549.199.337
2020	127.424.093.734.000

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Sepanjang Periode 2010-2017, anggaran pertahanan naik 154,8 persen. Disisi lain, Selama kurun waktu 2010-2020, anggaran pertahanan

menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun terjadi penurunan di tahun 2018. Peningkatan anggaran pertahanan untuk mendukung proyek prioritas nasional, terutama pada pemeliharaan dan pengadaan Alutsista TNI dan melanjutkan pembangunan Postur Pertahanan Militer yang diarahkan pada pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (*MEF*) TNI menuju Kekuatan Pokok TNI, berpedoman pada konsep pengembangan postur ideal TNI yang telah direncanakan dalam jangka panjang dengan mengacu pada aspek modernisasi alutsista, pemeliharaan dan perawatan, pengembangan organisasi maupun pemenuhan sarana prasarana yang didukung kemampuan industri pertahanan dan profesionalisme, serta peningkatan kesejahteraan prajurit. Anggaran tertinggi dicapai pada 2020 sebesar Rp127,4 triliun dan terendah pada 2010 sebesar Rp42,4 triliun. Hanya pada 2014, 2016, 2018 dan 2022 alokasi anggaran Kemhan mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 1,7%, minus 3,3%, minus 9% dan minus 8,4%. Secara rata-rata anggaran pertahanan tumbuh positif 9,5 persen pertahun atau naik dari Rp42,4 triliun pada 2010 menjadi Rp127,4 triliun pada 2020. Sebesar 55% anggaran pertahanan masih dialokasikan untuk dukungan manajemen dimana mayoritas anggaran pertahanan digunakan untuk menunjang gaji prajurit dan pegawai di Kemhan, Mabes TNI, dan Mabes Angkatan serta belanja rutin manajerial lainnya. Hal ini bukanlah cerminan yang baik bagi suatu negara yang memiliki visi pertahanan berkekuatan hebat di masa yang akan datang. Fakta lainnya di Indonesia adalah visi kemandirian alutsista yang tidak didukung dengan alokasi anggaran yang baik untuk riset industri pertahanan. Oleh karena berbagai fakta yang ada maka dapat disimpulkan bahwa manajemen alokasi anggaran pertahanan di Indonesia masih jauh dari kata cukup untuk menopang modernisasi dan mencapai kemandirian kekuatan pertahanan Indonesia.

Peningkatan anggaran pertahanan jika dilihat secara global, juga mengalami peningkatan. Walaupun terjadinya penurunan ekonomi di masing-masing negara akibat gejolak ekonomi, anggaran pertahanan

telah dipertahankan hampir pada tingkat yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan anggaran pertahanan di masing-masing negara secara global menggambarkan adanya persaingan keamanan yang berkembang.. Beberapa negara secara eksplisit mengalokasikan kembali sebagian dari pengeluaran militer yang direncanakan untuk berbagai urusan penting. Faktor lain penentu peningkatan anggaran pertahanan seperti halnya Amerika Serikat adalah investasi besar dalam penelitian dan pengembangan, dan beberapa proyek jangka panjang seperti modernisasi persenjataan nuklir Amerika Serikat dan pengadaan senjata skala besar. Namun, adanya kekhawatiran Amerika Serikat yang berkembang atas ancaman yang dirasakan oleh negara adikuasa tersebut dari pesaing strategis seperti China dan Rusia. Pengaruhi peningkatan anggaran pertahanan dan modernisasi militer China menjadi pemicu pendorong untuk “upaya pengadaan dan R&D” Amerika Serikat.

**Tabel 1.2 Pertumbuhan Rata-Rata Anggaran Pertahanan 5 Negara**

Country	Billion USD (current prices)	Share of region (%)	Share of GDP (%)	Average change 2010-19 (%)	Average change 2017-19 (%)
China	261.1	50.5	1.9	+7.1	+5.7
India	71.1	13.8	2.4	+3.6	+4.7
Japan	47.6	9.2	0.9	+0.2	+0.0
South Korea	43.9	8.5	2.7	+3.5	+6.3
Australia	25.9	5.0	1.5	+2.4	-0.2

Sumber: Defence Economics and Materiel Supply Regional Defence Economic Outlook 2021 Asia and Oceania

Pengeluaran militer China, yang diketahui tertinggi kedua di dunia, mengalami 76 persen selama dekade 2010–2020. Peningkatana anggaran pertahanan China disebabkan oleh keinginan untuk modernisasi dan rencana ekspansi militer jangka panjang, serta mengejar ketinggalan dengan kekuatan militer terkemuka. Perilaku tegas China, terutama dalam domain maritim dan ancaman nuklir dan rudal Korea Utara adalah sebagai

alasan penting untuk kenaikan belanja pertahanan yang berkelanjutan. Negara lainnya seperti Jepang juga mengalokasikan dana anggaran pertahanan untuk bidang militer non-konvensional seperti luar angkasa, dunia maya, dan peperangan elektromagnetik.

Lingkungan keamanan di kawasan Asia selama beberapa dekade terakhir didominasi oleh pertumbuhan kekuatan China. Tantangan geopolitik penting di kawasan Asia, yakni kebangkitan modernisasi ekstensif militer China, masalah kedaulatan dan integritas teritorial di Laut China Selatan, perlombaan senjata nuklir, dan kebangkitan terorisme, juga dampak aktivitas maritim China di Laut China Selatan, Laut China Timur, dan Samudera Hindia, dan kehadirannya yang semakin meningkat di Teluk Benggala dan Laut Arab, telah mendorong semua kekuatan maritim utama negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan kemampuan dan pengeluaran pertahanannya. Di Laut China Timur, baik China maupun Jepang mengklaim kepulauan Senkaku/Diaoyu di bawah pemerintahan Jepang, yang dari waktu ke waktu memicu ketegangan antara kedua negara. Jepang memandang kelanjutan kegiatan Angkatan Laut dan Angkatan Udara China di wilayah itu sebagai upaya untuk mengubah *status quo* melalui paksaan, meskipun tidak melalui kekuatan langsung.

Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah. Selama ini, penentuan jumlah anggaran pertahanan berdasarkan kepada faktor kemampuan keuangan negara dan alokasi prioritas pembangunan pada setiap Renstra Pembangunan Nasional. Pembiayaan pertahanan diperlukan untuk membiayai belanja pertahanan yang memerlukan dana keuangan, baik dari anggaran pemerintah atau dengan kata lain ekuitas (*equity financing*) maupun dari pinjaman (*debt financing*) yang pada akhirnya menjadi beban dari negara (*government balance sheet*). Untuk sistem penganggaran di Indonesia, ekuitas dalam sistem anggaran pemerintah dapat disebutkan dengan kata lain sebagai pembiayaan

dengan rupiah murni yang dibiayai langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Yusgiantoro, 2014).

Pengertian anggaran (*budget*) menurut Robert D Lee, Jr dan Ronald W Johnson adalah “*A document or a collection of documents that refer to the financial condition of an organization (family, corporation, government), including information on revenues, expenditures, activities, and purposes or goals*”. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pengertian anggaran tersebut adalah dokumen yang menunjukkan kondisi atau keadaan keuangan suatu organisasi (keluarga, perusahaan, pemerintah) yang menyajikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, aktivitas dan tujuan yang hendak dicapai. Hal-hal yang mendasari penentuan jumlah anggaran belanja suatu negara adalah pada faktor kemampuan keuangan suatu negara dan prioritas pembangunan. Secara hakekatnya, anggaran adalah sebuah bentuk kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku dalam jangka waktu tertentu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan daftar yang memuat rencana seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka mencapai tujuannya yang biasanya disusun untuk tahun anggaran. APBN merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan dimana penerimaan APBN berasal dari sektor-sektor penerimaan dalam negeri dan hibah. Sektor penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Pemerintah Indonesia senantiasa memantau dan mewaspadaikan perkembangan kondisi global dan domestik yang sangat dinamis serta berkomitmen menjaga APBN yang sehat, kuat, dan mandiri sebagai instrumen dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan rakyat.

Jika ditinjau dari data, anggaran pertahanan dan APBN cenderung menunjukkan kenaikan kecuali di tahun 2018 ketika anggaran pertahanan turun hingga 6 persen. Kenaikan anggaran pertahanan

tertinggi terjadi di tahun 2020, dimana anggaran pertahanan naik hingga 14 persen dari pagu anggaran tahun sebelumnya.

Berdasarkan uraian tabel penerimaan APBN Indonesia dari tahun 2010–2020, maka dapat diketahui trend pertumbuhan APBN. Pada keterangan tabel diatas dapat dilihat bahwa pertumbuhan sektor penerimaan APBN tahun 2010-2020 mengalami kondisi fluktuatif

**Tabel 1.3 Perbandingan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pertahanan di Indonesia**

TAHUN	APBN	ANGGARAN PERTAHANAN
2010	992.248.500.000.000	42.391.600.000.000
2011	1.165.252.500.000.000	50.033.900.000.000
2012	1.435.406.719.000.000	61.226.856.461.000
2013	1.683.011.103.699.000	87.706.685.334.000
2014	1.842.495.299.913.000	86.185.628.390.000
2015	1.793.588.917.000.000	105.907.340.480.000
2016	1.822.545.849.136.000	109.003.928.025.000
2017	1.750.283.380.176.000	117.506.617.827.295
2018	1.894.720.327.000.000	106.832.343.039.117
2019	2.165.111.800.000.000	115.424.549.199.337
2020	2.233.196.701.660.000	127.424.093.734.000

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Berdasarkan DIPA 2020, belanja Negara pada tahun 2020 diarahkan untuk menstimulasi perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan, terutama salah satunya melalui penguatan pertahanan dan keamanan. Berdasarkan data yang dimuat, bahwa realisasi belanja Pemerintah Pusat terjadi peningkatan yang disertai optimalisasi belanja yang lebih produktif. Kinerja realisasi sementara pendapatan negara hingga akhir tahun 2019 masih terjaga walaupun mengalami perlambatan

pertumbuhan imbas dari perlambatan ekonomi global yang tengah terjadi pada tahun anggaran (Kemenkeu, 2020).



**Gambar 1.1 10 Kementerian dan Lembaga Penerima Anggaran Terbesar dalam RAPBN 2020**

Sumber : Kementerian Keuangan

Jika dikaitkan APBN dengan belanja pertahanan, maka pengeluaran belanja pertahanan merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah negara dan sangat penting bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk menjaga sistem pertahanan negaranya. Hingga saat ini, anggaran belanja untuk Kementerian Pertahanan (Kemenhan) masih menjadi prioritas pemerintah dari semua penerima anggaran Kementerian/Lembaga. Prioritas anggaran pertahanan ini sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan alat utama sistem pertahanan (alutsista).

Anggaran pertahanan dimotivasi oleh kebutuhan keamanan (baik internal maupun eksternal) dan kendala yang disebabkan oleh variabel ekonomi seperti pendapatan per kapita yang rendah dan defisit anggaran belanja. Berbicara mengenai anggaran pertahanan sudah barang tentu berbicara mengenai Produk Domestik Bruto (PDB) dan hal ini sangat menarik untuk ditelaah. Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan indikator ekonomi yang lebih umum digunakan oleh berbagai negara dan untuk berbagai kepentingan. Persentase dari anggaran pertahanan

terhadap PDB di suatu negara menjadi tolak ukur dasar dalam menilai tingkat ancaman dan bagaimana suatu negara dianggap tanggap dalam menyelamatkan bangsanya.

Secara defenisinya, Produk Domestik Bruto (PDB) adalah pendapatan total dan pengeluaran total nasional atas output barang dan jasa pada periode tertentu. Produk Domestik Bruto digunakan untuk sebagai indikator penilai/pengukur pembangunan suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, PDB berperan penting dalam pengambilan kebijakan seperti alat proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk menentukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN). Dalam makro ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur kapabilitas sektor pertahanan dalam anggaran yang dimiliki suatu negara adalah komparasi (perbandingan) antara anggaran pertahanan dan Produk domestik bruto (dalam harga konstan/tingkat harga berjalan, sebagai proporsi dari PDB dan pada basis perkapita).

Pengeluaran pertahanan dimotivasi oleh kebutuhan keamanan (baik internal maupun eksternal) dan kendala yang disebabkan oleh variabel ekonomi seperti pendapatan per kapita yang rendah dan defisit anggaran belanja. Besaran jumlah anggaran pertahanan tidak terlepas dari bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara. Jika dibandingkan dengan negara maju, rata-rata negara berkembang menghabiskan 3 hingga 4 persen dari PDB mereka pada 1980 hingga saat ini untuk pertahanan. Namun, kendala yang ditemukan adalah terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi global dalam tahun ke tahun yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan nilai total anggaran pertahanan global. Kesulitan perekonomian nasional sebagai akibat dari fenomena penurunan harga minyak dan gas secara tajam, mendorong penghematan pengeluaran pemerintah (Setiadi 2020).

Rata-rata persentase anggaran belanja pertahanan di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 0,7 hingga 0,8 persen. Persentase ini telah terjadi sepanjang masa reformasi mengingat

upaya pemulihan ekonomi pasca krisis finansial tahun 1997 dan resistensi terhadap krisis finansial 2008. Adapun konsistensi kenaikan anggaran pertahanan tidak menunjukkan adanya perbaikan persentase anggaran pertahanan terhadap PDB hingga hari ini. Belum lagi jika persentase ini dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Baru yang mencapai 5 dan 3 persen dari PDB. Rendahnya persentase anggaran pertahanan terhadap PDB ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, terlebih bila dibandingkan dengan persentase anggaran pertahanan negara tetangga terhadap PDB.

**Tabel 1.4 Perkembangan Produk Domestik Bruto Indonesia**

<b>TAHUN</b>	<b>PDB</b>
2010	6.446.851.900.000
2011	7.419.187.100.000
2012	8.230.925.900.000
2013	9.087.276.500.000
2014	10.094.928.900.000
2015	11.526.332.800.000
2016	12.401.728.500.000
2017	13.589.825.700.000
2018	14.838.756.000.000
2019	15.832.535.400.000
2020	15.434.151.800.000

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Struktur ekonomi Indonesia menunjukkan peranan dari masing-masing lapangan usaha maupun komponen pengeluaran dalam pembentukan PDB. Berdasarkan data yang tersedia, terdapat 2 komponen pendukung peningkatan PDB yang meningkat, yakni PK-RT (Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga) dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P). Meskipun PK-P bukan termasuk salah satu kontributor tertinggi dalam pembentukan PDB, besaran kontribusi komponen ini menunjukkan peningkatan dari 8,81 persen pada tahun 2019 menjadi 9,29 persen pada tahun 2020. Berdasarkan komponen pengeluaran, struktur ekonomi

Indonesia pada tahun 2019 didominasi oleh komponen Konsumsi Rumah Tangga sebesar 56,62 persen; diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 32,33 persen; dan pada urutan ketiga adalah komponen Ekspor sebesar 18,41%. Sementara komponen Impor sebagai komponen pengurang dalam PDB memberikan kontribusi sebesar 18,90%.

Anggaran pertahanan suatu negara sebagai bagian dari Produk Domestik Bruto, adalah ukuran paling sederhana dari beban ekonomi relatif pertahana negara. Beban militer global meningkat sebesar 0,2 poin persentase pada tahun 2020, yang merupakan peningkatan tahunan terbesar sejak krisis keuangan dan ekonomi global pada tahun 2009.

Rank		Country	Spending (\$ b.)	Change (%)		Spending as a share of GDP (%) <sup>b</sup>		World share (%)
2020	2019 <sup>d</sup>		2020	2019-20	2011-20	2020	2011	2020
1	1	United States	778	4.4	-10	3.7	4.8	39
2	2	China	[252]	1.9	76	[1.7]	[1.7]	[13]
3	3	India	72.9	2.1	34	2.9	2.7	3.7
4	4	Russia	61.7	2.5	26	4.3	3.4	3.1
5	6	United Kingdom	59.2	2.9	-4.2	2.2	2.5	3.0
<b>Subtotal top 5</b>			<b>1 224</b>	..	..	..	..	<b>62</b>
6	5	Saudi Arabia	[57.5]	-10	2.3	[8.4]	[7.2]	[2.9]
7	8	Germany	52.8	5.2	28	1.4	1.2	2.7
8	7	France	52.7	2.9	9.8	2.1	1.9	2.7
9	9	Japan	49.1	1.2	2.4	1.0	1.0	2.5
10	10	South Korea	45.7	4.9	41	2.8	2.5	2.3
<b>Subtotal top 10</b>			<b>1 482</b>	..	..	..	..	<b>75</b>
11	11	Italy	28.9	7.5	-3.3	1.6	1.5	1.5
12	12	Australia	27.5	5.9	33	2.1	1.8	1.4
13	14	Canada	22.8	2.9	26	1.4	1.2	1.1
14	16	Israel	21.7	2.7	32	5.6	5.8	1.1
15	13	Brazil	19.7	-3.1	2.1	1.4	1.4	1.0
<b>Subtotal top 15</b>			<b>1 603</b>	..	..	..	..	<b>81</b>
16	15	Turkey	17.7	-5.0	77	2.8	2.0	0.9
17	17	Spain	17.4	-0.2	0.6	1.4	1.3	0.9
18	18	Iran	15.8	-3.0	-23	2.2	2.4	0.8
19	20	Poland	13.0	8.7	60	2.2	1.8	0.7
20	19	Netherlands	12.6	1.8	15	1.4	1.3	0.6
21	21	Taiwan	12.2	5.5	12	1.9	2.1	0.6
22	22	Singapore	10.9	3.4	23	3.2	3.2	0.6
23	23	Pakistan	10.4	-2.8	55	4.0	3.3	0.5
24	24	Algeria	9.7	-3.4	30	6.7	4.3	0.5
25	26	Indonesia	9.4	5.4	83	0.9	0.7	0.5
26	25	Colombia	9.2	-0.3	28	3.4	3.1	0.5
27	30	Thailand	7.3	1.0	26	1.5	1.5	0.4
28	28	Norway	7.1	-0.1	37	1.9	1.5	0.4
29	27	Iraq	(7.0)	-8.0	47	(4.1)	(2.3)	(0.4)
30	29	Kuwait	6.9	-5.9	17	6.5	3.5	0.3
31	32	Oman	[6.7]	1.7	22	[11]	[7.4]	[0.3]
32	33	Sweden	6.5	6.8	34	1.2	1.1	0.3
33	31	Mexico	6.1	-0.7	36	0.6	0.5	0.3
34	35	Ukraine	[5.9]	11	198	[4.1]	[1.5]	[0.3]
35	39	Romania	5.7	21	178	2.3	1.3	0.3
36	37	Switzerland	5.7	6.1	23	0.8	0.7	0.3
37	38	Belgium	5.5	12	6.4	1.1	1.0	0.3
38	34	Greece	5.3	-4.3	-7.5	2.8	2.5	0.3
39	40	Denmark	5.0	6.2	24	1.4	1.3	0.3
40	45	Morocco	4.8	29	54	4.3	3.3	0.2
<b>Subtotal top 40</b>			<b>1 827</b>	..	..	..	..	<b>92</b>
<b>World</b>			<b>1 981</b>	<b>2.6</b>	<b>9.3</b>	<b>2.4</b>	<b>2.4</b>	<b>100</b>

**Gambar 1.2 40 Negara Di Dunia Dengan Persentase Anggaran Pertahanan Terhadap Produk Domestik Bruto**

Sumber: SIPRI

Seperti yang diketahui, rata-rata persentase anggaran belanja pertahanan di Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 0,7 hingga 0,8 persen. Adapun konsistensi kenaikan anggaran pertahanan tidak menunjukkan adanya perbaikan persentase anggaran pertahanan terhadap PDB hingga hari ini. Belum lagi jika persentase ini dibandingkan dengan Orde Lama dan Orde Baru yang mencapai 5 dan 3 persen dari PDB. Rendahnya persentase anggaran pertahanan terhadap PDB ini menjadi perhatian dari berbagai pihak, jika dibandingkan dengan persentase anggaran pertahanan terhadap PDB secara global. Jika dibandingkan secara global, adapun tiga negara dengan anggaran pertahana terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2020 yaitu Singapura (\$10,9 miliar), Indonesia (\$9,4 miliar) dan Thailand (\$7,3 miliar). Pengeluaran militer di Asia Tenggara meningkat sebesar 5,2 persen menjadi \$45,5 miliar pada tahun 2020. Adapun faktor yang mendorong pengeluaran anggaran pertahanan meningkat di beberapa negara bagian di sub-kawasan adalah ketegasan lanjutan China dan berbagai sengketa teritorial di Laut Cina Selatan.

Secara keseluruhan negara-negara di Asia, China adalah negara dengan anggaran pertahanan terbesar pertama di Asia dan kedua di dunia, diperkirakan telah menyumbang 13 persen dari total global sebesar \$252 miliar, dihabiskan untuk pertahanan pada tahun 2020 dengan 1,9 persen lebih tinggi dari pada tahun 2019 dan berjumlah 1,7 persen dari Produk Domestik Bruto. Pengeluaran militer China telah meningkat selama 26 tahun berturut-turut. Pertumbuhan dari anggaran pertahanan China adalah hasil dari proses modernisasi dan ekspansi militer China dalam jangka panjang. Menurut Kementerian Pertahanan Nasional China, peningkatan pada tahun 2020 sebagian dilatar-belakangi oleh persepsi ancaman terhadap keamanan nasional China terkait dengan 'politik kekuasaan'. Terkhusus Jepang, dengan total \$49,1 miliar, maka Jepang adalah pembelanja militer terbesar kedua di Asia Timur pada tahun 2020. Pengeluaran anggaran belanja pertahanan Jepang meningkat sebesar 1,2

persen pada tahun 2019 dan sebesar 2,4 persen dari PDB pada tahun 2011. Pada 1,0 persen dari PDB, belanja pertahanan Jepang pada tahun 2020 mencapai batas pedoman yang diterapkan pada tahun 1976. Pengeluaran belanja pertahanan sebesar \$45,7 miliar pada tahun 2020, naik 4,9 persen dari PDB pada tahun 2019.

Pengeluaran belanja pertahanan India pada tahun 2020 adalah \$72,9 miliar atau 2,1 persen dari Produk Domestik Bruto lebih tinggi dari pada tahun 2019 dan 34 persen lebih tinggi dari pada tahun 2011. Peningkatan ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan konflik berkelanjutan India dengan Pakistan atas Kashmir dan ketegangan perbatasan baru dengan China, serta Persaingan India lebih umum dengan China sebagai kekuatan regional utama di Asia. Pengeluaran belanja pertahanan oleh 15 negara teratas berdasarkan tabel mencapai \$1603 miliar pada tahun 2020 dan menyumbang 81 persen dari pengeluaran belanja pertahanan global. Pengeluaran yang paling menonjol yaitu Israel, dimana masuk 15 besar menggantikan Turki, dan Inggris naik di atas Arab Saud. Arab Saudi sendiri, pengeluaran belanja pertahanannya turun 10 persen sehingga menjadi pembelanja terbesar kelima hingga tahun 2020. Semua kecuali tiga negara di 15 besar memiliki pengeluaran militer yang lebih tinggi pada tahun 2020 daripada tahun 2011. Terdapat pengecualian yaitu Amerika Serikat (-10 persen), Inggris (-4,2 persen) dan Italia (-3,3 persen). Peningkatan belanja militer China sebesar 76 persen sejauh ini merupakan yang terbesar di antara 15 negara teratas selama dekade 2011–2020. 15 negara teratas lainnya dengan peningkatan substansial antara 2011 dan 2020 adalah Korea Selatan (41 persen), India (34 persen), Australia (33 persen) dan Israel (32 persen). Dengan nominal anggaran pertahanan sebesar \$778 miliar, Amerika Serikat tetap menjadi negara dengan pembelanjaan terbesar di dunia pada tahun 2020, menyumbang 39 persen dari pengeluaran belanja pertahanan global. Peningkatan anggaran pertahanan dalam tahun keuangan yang mencakup 2018–2020, adalah upaya Amerika Serikat untuk berinvestasi

dengan fokus pada penelitian dan pengembangan, dan implementasi beberapa proyek jangka panjang seperti modernisasi persenjataan nuklir Amerika Serikat dan pengadaan senjata skala besar. Gejolak politik dan ancaman yang dirasakan Amerika Serikat dari pesaing strategis seperti China dan Rusia juga dorongan oleh mantan Presiden AS Donald J. Trump, menjadi alasan utama peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu alasan meningkatnya anggaran pertahanan di berbagai negara termasuk Indonesia adalah adanya kemajuan dari sisi pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dalam kebijakannya untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran pertahanan, sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi (Smith, 1989). Dewasa ini, isu pertumbuhan ekonomi menjadi persoalan makro-ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan ekonomi suatu negara dapat diukur dengan indikator pertumbuhan ekonomi.

*Ambition hypothesis* oleh Castillo (2001) menyatakan bahwa anggaran pertahanan memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan ekonomi. Pernyataan ini dikuatkan oleh Hukum Wagner yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya. Semakin besar kekuatan dan kekayaan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya. Negara akan mengejar peningkatan ekonomi dan kekuatan pertahanan merupakan tujuan yang tertinggi dari negara.

Namun, berbagai fenomena dan risiko perekonomian global memberikan tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memperkuat pertumbuhan ekonomi. Perekonomian Indonesia dari tahun ke tahun hingga tahun 2020, cukup

berhasil tumbuh positif walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat, baik dari faktor eksternal maupun internal dan di tengah perlambatan ekonomi global yang dipengaruhi oleh dinamika perang dagang dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di banyak negara. Tantangan perekonomian tersebut semakin perlu mendapat perhatian mengingat beberapa aspek domestik jangka pendek yang saling berhubungan menjadi kunci percepatan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi.

**Tabel 1.5 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia**

<b>TAHUN</b>	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI (%)</b>
2010	6.22%
2011	6.49%
2012	6.26%
2013	5,73%
2014	5,01%
2015	4.88%
2016	5,03%
2017	5,07%
2018	5,17%
2019	5,02%
2020	2.07%

Sumber: Nota Keuangan 2010-2020

Sebagai salah satu negara berkembang di dunia, Pertumbuhan ekonomi Indonesia secara umum tetap berdaya tahan dengan capaian 5,02% pada 2019. Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di Asia (BPS,2020). Meskipun lebih rendah dibandingkan dengan kinerja 2018 sebesar 5,17%, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tetap baik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi negara berkembang lain di

Asia, kecuali pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan India. Adanya ketidakpastian terhadap prospek perdagangan dunia meningkat, mengakibatkan keyakinan pelaku ekonomi menurun di banyak negara. Kondisi ini kemudian mengakibatkan volume perdagangan dunia pada 2019 berkontraksi sebesar 0,2%, terendah sejak krisis finansial global. Perkembangan yang kurang menguntungkan tersebut selanjutnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi global melambat secara merata, baik di negara maju maupun negara berkembang. Adanya kontraksi pertumbuhan global mencapai 3,27 persen, dimana Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan paling dalam sebesar 2,07 persen pada tahun 2020, bahkan untuk periode tahun 2010-2020.

Perekonomian kawasan Asia dan kontribusi kawasan terhadap pertumbuhan ekonomi global, terus meningkat selama beberapa dekade. Perkembangan ini sebagian besar dapat dikaitkan dengan China dan India, karena kedua negara telah mengalami tingkat pertumbuhan rata-rata 5 hingga 8 persen selama sepuluh tahun (2010-2020). Tingkat pertumbuhan saat ini sebagian merupakan hasil dari serangan balik dari paket stimulus besar-besaran yang diluncurkan setelah krisis keuangan global pada tahun 2009. Hal ini juga dapat dilihat sebagai konsekuensi dari upaya sadar oleh pemerintah China untuk mengalihkan fokus dari investasi berkecepatan tinggi dan pertumbuhan yang dipimpin manufaktur, menuju pertumbuhan berkualitas tinggi dengan ekonomi yang lebih merata, efisien dan seimbang. Namun, adanya pergeseran selain di dalam internal negara, dalam perekonomian global dewasa ini juga masih terus berlanjut, saling berkaitan dan memengaruhi dinamika perkembangan ekonomi dunia hingga dari tahun ke tahun hingga tahun 2020.

Berbagai kebijakan ekonomi berorientasi domestik yang timbul sebagai akibat daripada fenomena perekonomian global yang masih berlanjut di banyak negara dominan mempengaruhi dinamika perekonomian global. Adanya fenomena-fenomena ketegangan hubungan

perdagangan AS-Tiongkok 2019 menjadi pemicu kondisi ini. Ketegangan hubungan dagang juga meluas antara AS dengan Jepang, Perancis, Jerman, Meksiko, Australia, India, Brazil, dan Argentina, kemudian diikuti retaliasi dari masing-masing negara. Resiko dari geopolitik juga silih berganti makin menambah tidak kondusifnya ekonomi global. Perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (*Brexit*) yang terjadi secara berlarutlarut serta isu politik dan reformasi ekonomi di Meksiko, Brazil, Lebanon, dan Aljazair meningkatkan risiko geopolitik dan berpengaruh kepada kondisi ekonomi global. Aksi protes dan kerusuhan yang berkepanjangan di Hong Kong, Iran, Chili, dan Irak turut mengganggu upaya pemulihan ekonomi 2019 di berbagai wilayah negara berkembang. Kondisi global yang kurang kondusif itu menurunkan pertumbuhan ekonomi global.

Salah satu isu yang paling melemahkan pertumbuhan ekonomi dunia adalah perang dagang antar negara yang menimbulkan ketegangan perdagangan tidak hanya memicu pelemahan perdagangan barang dunia, namun juga berdampak pada aktivitas ekonomi. Kemudian perkembangan ketegangan hubungan perdagangan antar negara yang masih terus berlanjut mengakibatkan penekanan ekonomi AS dan Tiongkok sehingga berada pada lintasan melambat.

Tabel 1.6 Pertumbuhan Ekonomi Global

NEGARA DAN KELOMPOK NEGARA	KELOMPOK NEGARA		2015	2016	2017	2018	2019
Dunia			3,5	3,4	3,8	3,6	2,9
Negara Maju			2,3	1,7	2,5	2,2	1,7
	Amerika Serikat		2,9	1,6	2,4	2,9	2,3
	Eropa		2,1	1,9	2,5	1,9	1,2
	Jepang		1,2	0,6	1,9	0,3	0,7
NEGARA BERKEMBANG			4,3	4,6	4,8	4,5	3,7
	ASIA		6,8	6,7	6,6	6,4	5,6
		Tiongkok	6,9	6,7	6,8	6,6	6,1
		India	8,0	8,2	7,2	6,8	5,3
	Amerika Latin		0,3	-0,6	1,2	1,1	0,1
	Eropa Timur		0,8	1,8	3,9	3,1	1,8
	Timur Tengah dan Asia Tengah		2,6	5,0	2,3	1,9	0,8
	Afrika Sub Sahara		3,1	1,4	3,0	3,2	3,3

Sumber: Bank Indonesia dan IMF Menggunakan Tahun Fiskal

Perlambatan ekonomi di Amerika Serikat juga terjadi akibat dari mulai berkurangnya dampak stimulus fiskal sejak tahun 2018. Sementara itu, Tiongkok tumbuh lebih lambat dibandingkan dengan kondisi satu dekade sebelumnya sebagai konsekuensi dari kebijakan *rebalancing* ekonomi dan *deleveraging* sistem finansial. Ketegangan perdagangan pada akhirnya memukul aktivitas perdagangan serta investasi kedua negara. Terkhusus Indonesia, dengan berbagai fenomena dan perkembangan yang terjadi pada perekonomian global tersebut sudah pasti memberi dampak kepada perekonomian Indonesia.

Disamping fenomena perang dagang antar negara, sebagian besar pengeluaran negara untuk pertahanan tidak produktif di negara berkembang sebab negara-negara berkembang masih harus menghadapi berbagai tantangan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Setelah mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi sesuai target, negara berkembang kemudian ini memberi fokus pada belanja pertahanan. Solusi terbaik guna menghindari kerugian atau upaya peningkatan belanja pertahanan adalah peningkatan ekspor persenjataan ke negara lain dan upaya meningkatkan penerimaan devisa negara.

Kendala dari berbagai dinamika perekonomian global serta ancaman-ancaman global serta nasional yang terjadi di dunia akhir-akhir ini menjadi fenomena penentu anggaran pertahanan dan pembangunan kekuatan pertahanan. Terjadinya perlambatan pemulihan ekonomi global dalam tahun ke tahun juga tentu sangat berpengaruh pada pertumbuhan nilai total anggaran pertahanan baik secara nasional maupun global. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian mengenai bagaimana “Pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Anggaran Pertahanan Tahun 2010-2020”.

## **1.2 IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Anggaran Pertahanan secara manajemen alokasi anggaran di Indonesia masih jauh dari kata cukup untuk menopang modernisasi dan mencapai kemandirian kekuatan pertahanan Indonesia.
- b. APBN merupakan urat nadi bagi suatu negara dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran belanja pertahanan merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran pemerintah yang digunakan dalam sistem pertahanan negara Indonesia dan sangat penting bagi negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat untuk menjaga sistem

pertahanan negara. Pembangunan pertahanan negara sangat bergantung pada besarnya anggaran pertahanan yang dialokasikan pemerintah dalam APBN. Anggaran Kementerian Pertahanan dimana yang dimaksud adalah Kementerian Pertahanan masih menjadi prioritas pemerintah untuk meningkatkan kemampuan alat utama sistem pertahanan (ALUTSISTA). Meskipun lebih kecil dibandingkan fungsi lainnya, biaya anggaran pertahanan masih menjadi fokus belanja pemerintah pusat (APBN).

- c. Rata-rata persentase Anggaran Pertahanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mencapai 0,7 hingga 0,8 persen sehingga dapat disimpulkan bahwa belum tercapainya target sebesar 1,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Anggaran Pertahanan.
- d. Hukum Wagner menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pengeluaran belanja pemerintah dimana dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran belanja pemerintah akan meningkat. Negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang meningkat berambisi untuk memperbesar belanja pertahanannya. Semakin besar kekuatan dan kekayaan ekonomi suatu negara maka akan semakin besar pengeluaran pertahanannya. Hal ini menjadi tantangan bagi perekonomian Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian dan memperkuat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu negara berkembang di dunia

### **1.3 PEMBATASAN MASALAH**

Berdasarkan identifikasi masalah maka penelitian ini dibatasi dengan area penelitian di Indonesia pada masing-masing variabel sebagai berikut:

- a. Variabel anggaran pertahanan dibatasi pada jumlah anggaran pertahanan di Kementerian Pertahanan pada tahun 2010 – 2020.
- b. Variabel APBN dibatasi pada jumlah APBN di Indonesia pada tahun 2010-2020

- c. Variabel Produk Domestik Bruto dibatasi pada jumlah Produk Domestik Bruto di Indonesia pada tahun 2010-2020
- d. Variabel Pertumbuhan Ekonomi dibatasi pada persentase pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2010-2020

#### **1.4 RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama (simultan) memberi pengaruh terhadap Anggaran Pertahanan?
- b. Bagaimana pengaruh APBN terhadap anggaran pertahanan?
- c. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Anggaran Pertahanan?
- d. Bagaimana pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Pertahanan?

#### **1.5 TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi secara bersama-sama (simultan) terhadap Anggaran Pertahanan.
- b. Menganalisis pengaruh positif signifikan APBN terhadap Anggaran Pertahanan.
- c. Menganalisis pengaruh positif signifikan Produk Domestik Bruto terhadap Anggaran Pertahanan.
- d. Menganalisis pengaruh positif signifikan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Anggaran Pertahanan.

## **1.6 MANFAAT PENELITIAN**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini pada akhirnya dapat digunakan oleh akademisi dan peneliti selanjutnya sebagai bahan literasi dan wawasan untuk penelitian lebih lanjut terhadap pengembangan keilmuan ekonomi pertahanan di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberi kontribusi dan penguatan pada teori-teori Ekonomi Pertahanan, khususnya mengenai hubungan dan pengaruh APBN, Produk Domestik Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi, Terhadap Anggaran Pertahanan Tahun 2010-2020 dalam menghadapi berbagai dinamika perekonomian global serta ancaman-ancaman global serta nasional, serta upaya peningkatan anggaran pertahanan juga penyusunan dan pengeluaran anggaran belanja pertahanan di Indonesia.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

- a. Manfaat bagi peneliti adalah melalui hasil penelitian maka dapat ditemukan keterkaitan dan pengaruh daripada fenomena dan teori-teori yang digunakan, sehingga kebenaran pada hasil penelitian dapat dipertanggung-jawabkan.
- b. Bagi Kementerian Pertahanan adalah sebagai masukan dan bahan pertimbangan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pertahanan terutama dalam bidang anggaran yang lebih optimal.
- c. Bagi Universitas Pertahanan Republik Indonesia adalah hasil penelitian kedepan dapat digunakan untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan, serta menambah perbendaharaan perpustakaan untuk dijadikan referensi penelitian selanjutnya.
- d. Bagi kementerian/lembaga terkait adalah hasil penelitian dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan untuk menghadapi berbagai dinamika perekonomian global serta ancaman-ancaman global serta nasional serta upaya mitigasinya.